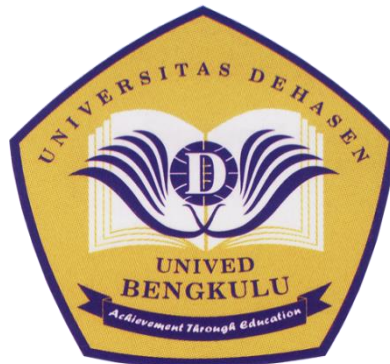


**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**



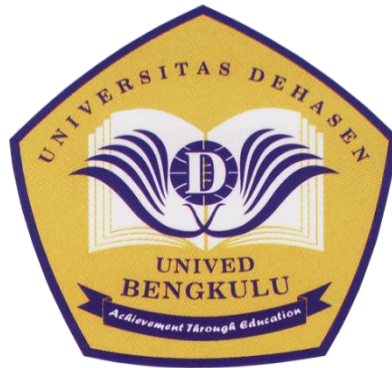
SKRIPSI

OLEH

ARIF WIBOWO
NPM. 18050049P

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
2023**

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

OLEH

ARIF WIBOWO
NPM. 18050049P

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DEHASAN BENGKULU
2023**

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

SKRIPSI

OLEH

ARIF WIBOWO
NPM. 18050049P

*Telah disetujui dan disahkan
Oleh Dosen Pembimbing*

Pembimbing Utama,



Neri Susanti, SE., M.Si
NIDN. 0210017401

Pembimbing Pendamping,



Rinto Noviantoro, SE., M.Si, Ak, CA
NIDN. 0222118002

Bengkulu, 10 Januari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu



Neri Susanti, SE., M.Si
NIDN. 0210017401

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

SKRIPSI

OLEH

ARIF WIBOWO
NPM. 18050049P

*Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 Januari 2023
Dan dinyatakan LULUS*

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua,



Neri Susanti, SE, M.Si.
NIDN. 0210017401

Sekretaris,



Rinto Noviantoro, SE., M.Si, Ak, CA
NIDN. 0222118002

Anggota,



Abdul Rahman, SE, MM
NIDN. 0204056001

Anggota,



Wagini, SE, M.Ak
NIDN. 0220068003

Bengkulu, 13 Januari 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu



Dr. Suwarni, S.Kom, M.M.
NIDN. 0211047001

MOTTO

*Orang yang SUKSES adalah orang yang GAGAL membuat alasan-alasan
Biarlah Terlambat Membuat Orang Tua Tersenyum, daripada tidak sama sekali*

Karya ini Ku Persembahkan Kepada:

Ucapan Alhamdulillah dan terimakasih. Tak ada kebahagiaan yang berarti dalam perjuangan melainkan hasil yang diridhoi dan membawa berkah. Tak ada harapan yang lebih diinginkan dari yang tercinta melainkan iringan doa semoga manfaat dalam setiap langkah. Hanya skripsi ini yang bisa kupersembahkan untuk orang - orang yang tersayang;

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

Skripsi ini saya persembahkan untuk saudara-saudara saya yaitu Mas Bakat, Mas Joko, Mbak Endah dan juga untuk ayuk ipar ku yaitu ayuk Reva dan ayuk Putri serta keponakan ku yang ganteng -ganteng yaitu Hafidh, Fachry dan Rafasya yang selalu menjadi penyemangat Paklek Arif dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terkadang saya merasa seperti tidak berada di tempat lain. Saya hanya merasa tidak ada yang bisa memahami saya. Tetapi kemudian saya ingat bahwa saya memiliki kalian, Teman. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa kalian sahabatku. Terima kasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.

Agama, Bangsa dan Almamater yang membentukku

**THE INFLUENCE OF ACCOUNTING UNDERSTANDING AND THE
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM
ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS OF REGIONAL WORK
UNITS (OPD) IN BENGKULU PROVINCIAL GOVERNMENT**

By:

Arif Wibowo¹⁾

Neri Susanti and Rinto Noviantoro²⁾

ABSTRACT

Regional financial reports are a form of accountability carried out by each agency/service or regional work unit (OPD), including the OPD in Bengkulu Province. The purpose of regional financial reporting is one of the efforts to create public accountability. Government financial reports must have quality because these reports are used for the decision-making process. In order for the quality of decision making to increase, the information presented must also be of high quality. Within the scope of government, local governments are obliged to be able to present quality financial reports in accordance with Government Regulations. The aims of this study were: (1) to prove the effect of accounting understanding on the quality of OPD financial reports within the Bengkulu Provincial Government; and (2) to prove the effect of implementing the government's internal control system on the quality of OPD financial reports within the Bengkulu Provincial Government. The data used in this study is primary data obtained from the results of distributing questionnaires to OPD financial managers in Bengkulu Province, totaling 144 people. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. From testing the hypothesis, the results are obtained: (1) The regression equation obtained is $Y = 39.463 + 0.149X_1 + 0.218X_2$; (2) Understanding of accounting affects the quality of local government financial reports. These results indicate that the better the accounting understanding of financial managers, the better quality regional financial reports will be produced; (3) The application of the government internal control system affects the quality of regional financial reports. These results indicate that the better the government internal control system is able to encourage the creation of quality financial reports; and (4) The value of the coefficient of determination (R^2) of 0.401 means that the influence of accounting comprehension variables and the government's internal control system on the quality of OPD financial reports in Bengkulu Province is 40.1%, while the remaining 59.9% is influenced by other factors in outside research.

Keywords: *Understanding of accounting; Implementation of Internal Control Systems and Quality of Financial Reports*

1) Student

2) Supervisors

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Oleh:

Arif Wibowo¹⁾
Neri Susanti and Rinto Noviantoro²⁾

RINGKASAN

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh setiap instansi/dinas atau satuan kerja perangkat daerah (OPD) termasuk di dalamnya adalah OPD di Provinsi Bengkulu. Tujuan dari pelaporan keuangan daerah merupakan salah satu upaya untuk menciptakan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah haruslah memiliki kualitas karena laporan ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Agar kualitas pengambilan keputusan meningkat, maka informasi yang disajikan juga harus berkualitas. Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk membuktikan pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; dan (2) untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pengelola keuangan OPD di Provinsi Bengkulu yang berjumlah 144 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Dari pengujian hipotesis diperoleh hasil : (1) Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 39,463 + 0,149X_1 + 0,218X_2$; (2) Pemahaman akuntansi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi pengelola keuangan maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas; (3) Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah mampu mendorong penciptaan laporan keuangan yang berkualitas; dan (4) Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,401 memberikan arti bahwa pengaruh variabel pemahaman akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 40,1%, sedangkan sisanya 59,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Kata Kunci: Pemahaman akuntansi; Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan

- ¹⁾ Mahasiswa
²⁾ Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Ibu Dr. Suwarni, S.Kom, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
2. Ibu Neri Susanti, SE, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Bapak Rinto Noviantoro, SE, M.Si, Ak, CA selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Abdul Rahman, SE, MM dan Ibu Wagini, SE, M.Ak selaku tim penguji yang telah memberi masukan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
6. Seluruh Staf Karyawan/Karyawati Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
7. Responden pengelola keuangan OPD di Provinsi Bengkulu yang telah memberi data penelitian, sehingga penelitian ini berjalan dengan baik.
8. Rekan-rekan yang telah memberikan banyak membantu dan memberikan dorongan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran, sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Demikian, terima kasih.

Bengkulu, Juli 2023

Penulis,

Arif Wibowo
NPM. 18050049P



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arif Wibowo
No. Mahasiswa : 18050049P
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan Skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Dehasen Bengkulu. Atau dengan kata lain, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila skripsi saya terbukti ketidakeasliannya, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Dehasen Bengkulu.
3. Apabila kelak di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Dehasen Bengkulu.

Bengkulu, 12 Januari 2023

Yang Menyatakan,



ARIF WIBOWO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL LENGKAP	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	11
2.1.2 Laporan Keuangan Sektor Publik	12
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	13
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Publik	18

2.1.4.1	Pemahaman Akuntansi	20
2.1.4.2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	24
2.2	Penelitian Terdahulu	35
2.3	Kerangka Analisis	37
2.4	Hipotesis Penelitian	38
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	39
3.2	Definisi Operasional	39
3.3	Metode Pengambilan Sampel	42
3.4	Metode Pengumpulan Data	43
3.5	Metode Analisis	43
3.5.1	Uji Normalitas	43
3.5.2	Uji Validitas dan Reliabilitas	44
3.5.3	Analisis Regresi	45
3.5.4	Uji Hipotesis	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian	48
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.2	Deskripsi Penyebaran Kuesioner	53
4.1.3	Karakteristik Responden	54
4.1.4	Deskripsi Data Penelitian	55
4.1.5	Hasil Normalitas Data	57
4.1.6	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	58
4.1.7	Hasil Analisis Regresi	61
4.1.8	Hasil Pengujian Hipotesis	62
4.2	Pembahasan	64
4.2.1	Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	64
4.2.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	68
4.2.3 Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	72
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	4
Tabel 2. Rangkuman Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3. Variabel dan Indikator Penelitian	45
Tabel 4. Daftar OPD Objek Penelitian	48
Tabel 5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	54
Tabel 6. Karakteristik Demografi Responden	54
Tabel 7. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian	56
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Data Penelitian	58
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	59
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	60
Tabel 11. Hasil Analisis Regresi	61
Tabel 12. Ringkasan Nilai Koefisien Regresi dan Nilai t-hitung Variabel Pemahaman Akuntansi	64
Tabel 13. Ringkasan Nilai Koefisien Regresi dan Nilai t-hitung Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	68
Tabel 13. Ringkasan Nilai Koefisien Determinasi dan Nilai F-hitung Variabel Independen	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Analisis	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas Data

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran 7. Hasil Analisis Regresi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government*, pemerintah daerah bertanggung jawab memenuhi harapan masyarakat tersebut. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kedua prinsip dasar tersebut merupakan bagian yang saling berhubungan antara satu dan lainnya dalam setiap penentuan kebijakan publik dan pertanggungjawabannya dalam dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Apabila terjadi ketimpangan di antara salah satu dari prinsip dasar tersebut maka dapat dikatakan pemerintahan tersebut gagal dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dikelola dalam pengelolaan

pemerintah yang transparan, maupun itu dalam bentuk tahap penyusunan, penggunaan, ataupun pertanggungjawaban dengan berlandaskan konsep *value for money*, yang pada nantinya akan menciptakan akuntabilitas publik (*public accountability*) sebaik-baiknya.

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh setiap instansi/dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya adalah OPD di Provinsi Bengkulu. Tujuan dari pelaporan keuangan daerah merupakan salah satu upaya untuk menciptakan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah haruslah memiliki kualitas karena laporan ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Agar kualitas pengambilan keputusan meningkat, maka informasi yang disajikan juga harus berkualitas. Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah:

1. Relevan, berarti bahwa laporan keuangan memiliki informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang merupakan hasil evaluasi dari masa lalu.
2. Andal, berarti bahwa laporan keuangan memiliki informasi yang tidak menyesatkan karena disajikan secara faktual, jujur dan dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan, berarti bahwa laporan keuangan periode berjalan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya atau setelahnya atau dapat pula dibandingkan dengan entitas lainnya.
4. Dapat dipahami, berarti bahwa laporan keuangan bersifat informatif dan mudah untuk dipahami dan dipelajari oleh entitas pelaporan maupun pengguna lainnya.

Menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tentu saja tidak mudah, karena selain diperlukan para pengelola atau sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi daerah juga harus memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan baik. Secanggih apapun sistem dan teknologi yang digunakan, namun tanpa adanya keseriusan SDM dalam menjalankannya maka tentu saja pencapaian tujuan organisasi tidak akan tercapai.

Berkenaan dengan sumber daya manusia pengelola keuangan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kemampuan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan melalui program-program pendidikan dan latihan, baik untuk tataran pengambilan kebijakan keuangan maupun pada tataran operator sistem informasi keuangan daerah. Melalui upaya diklat tersebut, diharapkan pegawai yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan daerah mampu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dengan baik dan berpedoman pada aturan yang berlaku, sehingga penyimpangan atau penyalahgunaan terkait penggunaan dana publik tidak terjadi.

Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah tersebut, BPK Republik Indonesia memberikan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK tersebut terdiri dari empat jenis, yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (**WTP**), yakni opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan SAP. Opini Wajar Dengan Pengecualian (**WDP**), yakni yakni opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Opini Tidak Wajar (**TW**), yakni opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan SAP. Opini Tidak Memberikan Pendapat (**TMP**), yakni opini penolakan memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas yang diperiksa kaena laporan tidak cukup untuk membuat suatu opini audit.

Terkait dengan kualitas laporannya, Pemerintah Provinsi Bengkulu selama empat tahun berturut-turut memperoleh predikat yang membanggakan berdasarkan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Prestasi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dilakukan memiliki kualitas yang sangat baik.

Tabel 1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI/Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Provinsi Bengkulu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3	Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Bengkulu Utara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Kaur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Kepahiang	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
7	Kabupaten Lebong	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
8	Kabupaten Mukomuko	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
9	Kabupaten Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kabupaten Seluma	WDP	TW	WDP	WDP	TW
11	Kota Bengkulu	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP

Sumber: BPK-RI Kantor Perwakilan Bengkulu, 2022 (www.bpk.go.id)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk pernyataan terbaik atas penentuan kualitas laporan keuangan pemerintah. Opini BPK diberikan setelah memeriksa LKPD yang telah diselesaikan oleh pemerintahan daerah didasarkan pada Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang *opini audit*. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan BPK kepada entitas Pemerintah Provinsi Bengkulu yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terkait dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, prestasi WTP yang diberikan oleh BPK tersebut tidak berarti bebas dari penyimpangan. Terjadinya beberapa kasus pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti yang dilakukan oleh pengelola keuangan pada Tahun 2013, yakni penyaluran dana APBD sebesar Rp 26.02 miliar, tidak di sertai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bahkan ada

yang fiktif. Temuan ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu masih harus banyak dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, tentu saja tidak berlebihan jika sebagai pengelola keuangan daerah, keahlian dalam bidang akuntansi sangat dibutuhkan, sehingga nantinya akan menghasilkan informasi keuangan daerah yang relevan dan handal sebagaimana dipersyaratkan dalam kualitas laporan keuangan.

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, pemahaman akuntansi merupakan aspek yang sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Mardiasmo, 2017:13). Kemampuan pengelola keuangan menyusun laporan sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku menjadi modal dasar untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Selain pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi juga berperan penting dalam penciptaan kualitas laporan keuangan (Mardiasmo, 2017:15) dan Bastian (2012:34). Saat ini, setiap entitas pemerintah daerah wajib menggunakan sistem informasi untuk menyusun dan membuat laporan keuangan (bersifat *mandatory*). Sistem informasi yang digunakan adalah seragam yakni Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMDA). Tujuan dari penggunaan atau pemanfaatan sistem informasi ini adalah mempercepat pekerjaan, meningkatkan tingkat keamanan, menghemat biaya dan tentu saja meningkatkan kualitas hasil laporan.

Selanjutnya, faktor yang juga berkaitan dengan kualitas laporan keuangan adalah adanya sistem pengendalian intern yang baik (Bodnar & Hopwood, 2016). Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 secara tegas dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern merupakan kegiatan wajib dilakukan pimpinan dan lembaga lain yang berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah. Pengendalian intern secara berkelanjutan dilakukan untuk menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, efektif dan efisien, serta untuk mencegah korupsi (*clean government*), menciptakan akuntabilitas yang nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good government*).

Dari uraian pentingnya pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi dan peran penting sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah, maka disepakati bahwa kedua faktor tersebut sangat diperlukan dalam menciptakan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk membuktikan pengaruh kedua faktor tersebut, maka penulis akan melakukannya dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu?
2. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu?
3. Apakah pemahaman akuntansi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Untuk membuktikan pengaruh pemahaman akuntansi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan agar memberikan manfaat bagi peneliti, instansi yang diteliti dan ilmu pengetahuan seperti dijelaskan berikut ini.

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam akuntansi sektor publik khususnya pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi instansi yang bersangkutan penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi sumber informasi dalam melakukan evaluasi terhadap pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi dan penerapan SPI untuk dilakukan perbaikan ke arah yang lebih baik dalam menciptakan manajemen pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah yang ada, sehingga hasil penelitian ini akan dapat dijadikan bahan pertimbangan guna melahirkan kebijakan perbaikan terhadap manajemen keuangan daerah sehingga terciptanya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik secara keseluruhan.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam peningkatan ilmu pengetahuan terutama tentang pengelolaan pemerintah menuju *good governance* serta menjadi referensi, khususnya yang mengkaji mengenai topik – topik yang berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Peneliti memfokuskan pada pengaruh pemahaman akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan OPD. Variabel pemahaman akuntansi diukur dengan lima dimensi menurut Bastian (2010:34) yakni pemahaman transaksi, analisis alat bukti, pencatatan transaksi, pengelompokan dan pengikhtisaran dan pelaporan. Kelima dimensi tersebut diukur dengan 15 indikator. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan lima dimensi menurut Bodnar dan Hopwood (2016:54) yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Kelima dimensi tersebut dijabarkan ke dalam 13 indikator. Sedangkan variabel kualitas laporan keuangan OPD diukur dengan empat dimensi yang bersumber dari PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat dimensi tersebut dijabarkan ke dalam 11 item indikator. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemda Provinsi Bengkulu yang berjumlah 39 OPD.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2001:5) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik disebut juga akuntansi pemerintahan dan juga disebut sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan *accrual base* di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.

Halim (2013:3) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik didefinisikan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Renyowijoyo (2013:1) berpendapat bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai alat pertanggung jawaban publik.

Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi sektor publik dideskripsikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, menggolongkan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk

pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Secara kelembagaan, ranah publik antara lain melingkupi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah beserta bidang kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan publik yang dipakai sebagai alat pertanggung jawaban publik yang selanjutnya diolah menjadi informasi keuangan yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memrlukan.

2.1.2 Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan dipersiapkan manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (Yadiati, 2017: 157).

Munawir (2012:56) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Kasmir (2014:7) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada kondisi saat ini atau periode tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sektor publik adalah informasi atas laporan keuangan atau kondisi keuangan pada suatu perusahaan ataupun lembaga publik seperti pemerintahan, BUMN, LSM dan lain-lain yang merupakan suatu alat penting yang dijadikan pertanggung jawaban dan alat komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan bukti tertulis dari pencatatan transaksi dan akuntansi yang dilakukan oleh entitas laporan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan yang dibuat oleh entitas tersebut harus berkualitas dan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan

pemerintah No 8 Tahun 2016, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Menurut Halim dan Iqbal (2012:30) kualitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan dan sasaran (*outcome*) yang harus dicapainya. Kualitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Namun demikian, penyimpangan dalam pelaksanaan tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif hanya dilihat dari proses kerja unit yang dimaksud.

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2015:10) karakteristik kualitatif laporan

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-perode sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2017:35) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan meterialitas. Sejalan dengan pendapat Mardiasmo tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa secara kualitatif, kualitas laporan dapat diukur dari aspek relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat aspek tersebut, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa

depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka pada masa lalu.

Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi yang disajikan dapat memberikan kemungkinan kepada pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi (pengharapan) mereka pada masa lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi yang disajikan dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Indikator dari dimensi ini adalah:

- a. Dapat dibandingkan dengan periode laporan sebelumnya
 - b. Dapat dibandingkan dengan laporan dari entitas lainnya
4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Indikator dapat dipahami adalah:

- a. Laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang sama

- b. Kesamaan dalam penggunaan istilah oleh semua *entitas* laporan keuangan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan publik harus memenuhi standar kualitas sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta pengukurannya sesuai dengan indikator-indikator pada masing-masing aspek kualitas laporan keuangan tersebut.

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Publik

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi sektor publik adalah merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dalam sektor publik (pemerintah) (Mardiasmo, 2017:40).

Lebih lanjut Mardiasmo (2017:41) menjelaskan bahwa untuk mencapai laporan yang berkualitas sangat diperlukan prosedur akuntansi standar yang merupakan aturan-aturan dan alur-alur sistematis yang harus dilakukan atau dilalui dalam pelaksanaan pelaporan akuntansi keuangan publik. Untuk mendukung pencapaian laporan keuangan yang berkualitas,

beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti dukungan sumber daya manusia yang kompetensi (yang memiliki pemahaman yang baik dalam sistem akuntansi sektor publik); standar akuntansi pemerintahan yang relevan; sistem pengawasan dan pengendalian; sistem informasi akuntansi yang handal; dan mekanisme kerja dalam organisasi (Mardiasmo, 2017:42). Sejalan dengan hal itu, Bodnar dan Hopwood (2016:33) menjelaskan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas laporan keuangan.

Kawedar (2019:34) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi keuangan daerah dan implementasi standar akuntansi pemerintah. Amran (2019:33) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan (2012:33) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah kemampuan sumber daya manusia, implementasi SAP, komitmen sumber daya manusia, dan faktor pengawasan pimpinan.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sangatlah banyak. Dalam penelitian hanya diambil tiga faktor saja yang mempengaruhi

kualitas laporan keuangan daerah. Ketiga faktor tersebut diambil karena relatif sesuai untuk diterapkan pada objek penelitian. Faktor yang dimaksud adalah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi dan penerapan sistem pengendalian intern.

2.1.4.1 Pemahaman Akuntansi

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2016:342) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Robbins (2016:334) yang menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang mengerti terhadap sesuatu hal. Jika itu mengenai pekerjaan maka dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam pekerjaannya.

Selanjutnya, pengertian akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 adalah akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar

Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Jadi, dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang (dalam hal ini pengelola keuangan) dalam bidang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Yuliani (2017:22) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan

pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Menurut Bastian (2012:33) dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik, hal-hal yang dijadikan fokus perhatian atau kegiatan adalah:

1. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

2. Analisis Bukti Transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3. Mencatat Data Transaksi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4. Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (Posting)

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.

5. Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi merupakan pemahaman pengelolaan keuangan daerah terhadap proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan daerah. Indikator variabel pemahaman akuntansi sama dengan indikator yang

digunakan dalam penelitian Sari (2013:21) yakni: memahami prosedur akuntansi penerimaan kas, memahami prosedur akuntansi pengeluaran kas, memahami prosedur akuntansi asset, dan memahami prosedur akuntansi selain kas.

2.1.4.2 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian internal berguna untuk membantu pimpinan mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan, mengaktifkan manajemen untuk berurusan dengan perubahan internal dan lingkungan eksternal, meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko kerugian, membantu memastikan keandalan laporan keuangan, mematuhi hukum dan peraturan (Bodnar dan Hopwood, 2016:41).

Untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, pimpinan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Komponen monitoring untuk memungkinkan operasi manajemen yang efektif dan landasan untuk menentukan apakah sistem pengendalian internal terus beroperasi secara efektif dari waktu ke waktu (Ionescu, 2019:55).

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dilakukan agar terciptanya suatu pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik *good governance*.

Teknis pelaksanaan dari SPIP ini harus dikerjakan dan menjadi tanggungjawab dari setiap kepala instansi pemerintah. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 2 PP Nomor 60 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga/instansi, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah untuk melindungi aset negara baik aset fisik

maupun aset data, memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat, menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan handal, memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (SAP), meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi, dan menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tertera dalam pengendalian.

Bodnar dan Hopwood (2016:42) komponen atau indikator pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring. Indikator Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara dan mengacu pada pendapat Bodnar dan Hopwood (2016:43), yang meliputi: Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian dalam SPI merupakan unsur dasar/ fondasi bagi pembentukan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu fondasi dalam membangun SPIP harus kuat agar dapat menopang dan mendukung unsur-unsur lainnya sehingga apa yang diharapkan SPIP dapat terwujud. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun. Sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna jika dijalankan oleh orang-orang yang baik maka akan mampu membawa kebaikan, karena organisasi tidak dapat menjamin bahwa semua orang baik atau orang yang baik akan selalu baik, maka diperlukan unsur pengendalian lainnya.

Pada prinsipnya pengendalian merupakan *tone from the top*, sehingga komitmen, kebijakan dan keteladanan dari pemimpin sangat penting. Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku

positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya yang tepat
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Usaha pemerintah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Identifikasi risiko; Identifikasi resiko dilaksanakan dengan penggunaan metodologi yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara menyeluruh, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- b. Analisis risiko; Analisis Resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan Instansi Pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Tujuan pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan instansi pemerintah perlu

menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah dan dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan harus dilaksanakan, kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Review atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia dengan mengkomunikasikan

visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai. Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumberdaya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi. Membuat uraian jabatan, prosedur, rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, sistem penilaian kinerja serta rencana pengembangan karir.

- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset. Pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplemantasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai. Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik serta rencana pemulihan setelah bencana.
- e. Penetapan dan Review atas indikator dan ukuran kinerja. Pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja, mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja dan membandingkan secara terus menerus data

capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

- f. Pemisahan fungsi. Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dan klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. Pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan Review atas pembatasan tersebut secara berkala.

- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumberdaya dan pencatatannya serta melakukan Review atas penugasan tersebut secara berkala.
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian.

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam SPI adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam *posting* dan mengikhtisarkan.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan Review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan Review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, Review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan Review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang diperoleh cukup beragam, sesuai dengan kondisi di tataran empiris. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan rujukan dalam penelitian ini terangkum pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil
1	Indriasih dan Koeswayo (2014)	Aparatus Competence; Internal Control dan Quality of Financial Reporting	Kompetensi aparatur dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
2	Best, Braam dan Boelens (2019)	Pengujian Ukuran Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan terukur dari : relevan, mudah dipahami, dapat dibandingkan, ketepatan waktu
3	Diana (2014)	Variabel : Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi, Peran Internal Audit dan Kualitas Laporan Keuangan Metode : Analisis Regresi Linier Berganda	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi dan peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Pariaman
4	Pramana <i>et al.</i> (2020) Univ. Dehasen	Variable: Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan Metode: Analisis regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5	Fibrianto (2020) Univ. Dehasen	Variabel : Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akntabilitas Laporan Keuangan Metode: Analisis korelasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berhubungan dengan akuntabilitas laporan keuangan

Jika diperhatikan pada Tabel 2 di atas terlihat bahwa penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang sama dengan penelitian sekarang, akan tetapi ada pengukuran variabel yang berbeda yaitu pada pemahaman

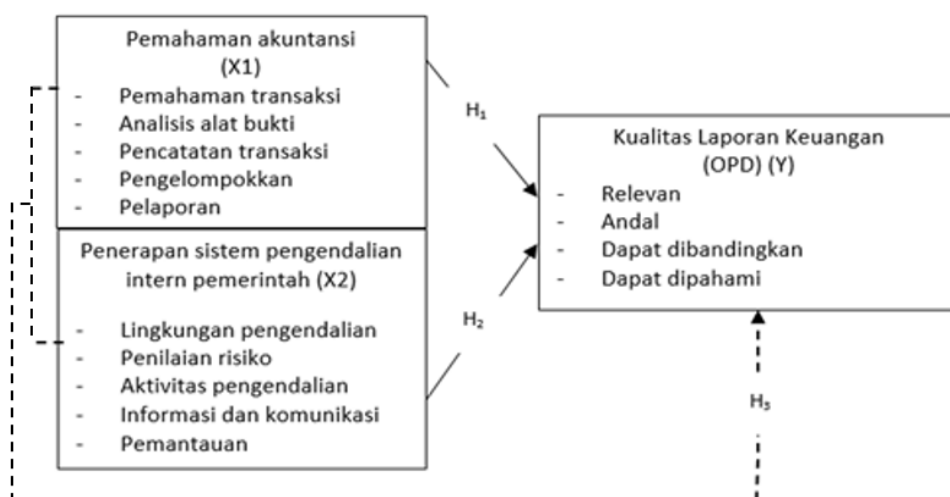
akuntansi, disini penulis menggunakan indikator yang diungkapkan Mardiasmo (2017:45).

Perbedaan lainnya adalah penggunaan indikator variabel pemanfaatan sistem informasi yang mengacu pada pendapat DeLone & McLean (2003:11). Sementara pada variabel kualitas laporan keuangan sama dengan studi terdahulu, yakni menggunakan ukuran kualitatif laporan keuangan yang telah terstandarisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Begitu pula dengan variabel sistem pengendalian intern penulis juga mengacu pada pendapat Bodnar dan Hopwood (2016:55).

2.3 Kerangka Analisis

Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teori, secara skematis kerangka analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Analisis



Gambar kerangka analisis di atas menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi (X_1) dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) sebagai variabel independen (X) memiliki pengaruh langsung terhadap variabel dependen (Y), baik secara sendiri-sendiri (parsial) maupun bersama-sama (simultan). Pengaruh secara parsial ditunjukkan dengan garis hipotesis H_1 dan H_2 , sedangkan pengaruh secara Bersama-sama ditunjukkan dengan garis hipotesis H_3 .

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara terhadap keterkaitan antar variabel. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka analisis, dapat dirumuskan hipotesis penelitian seperti pemaparan berikut ini.

- 1) H_{01} : Pemahaman akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD.
 H_{a1} : Diduga pemahaman akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD.
- 2) H_{02} : Penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD.
 H_{a2} : Diduga penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD.
- 3) H_{03} : Pemahaman akuntansi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD.

Ha₃ : Diduga pemahaman akuntansi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti. Umar (2008:45) menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen, dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependen secara langsung.

3.2 Definisi Operasional

1. Kualitas laporan keuangan adalah pencapaian dari ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam laporan keuangan agar dapat memenuhi tujuannya oleh pengelola keuangan OPD di Provinsi Bengkulu. Dimensi yang diukur adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat dimensi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 12 parameter (indikator). Parameter ini diukur dengan skala *likert* 1-5, dengan kriteria nilai 1 (sangat tidak setuju); nilai 2 (tidak setuju); nilai 3 (cukup setuju); nilai 4 (setuju); dan nilai 5 (sangat setuju).
2. Pemahaman akuntansi keuangan daerah merupakan pemahaman pengelolaan keuangan OPD di Provinsi Bengkulu terhadap proses pengidentifikasian, pengukuran/pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan daerah. Dimensi yang diukur adalah

- pengidentifikasian, pengukuran dan pencatatan serta pelaporan transaksi. Dimensi tersebut dijabarkan menjadi 9 indikator. Parameter ini diukur dengan skala *likert* 1-5, dengan kriteria nilai 1 (sangat tidak setuju); nilai 2 (tidak setuju); nilai 3 (cukup setuju); nilai 4 (setuju); dan nilai 5 (sangat setuju).
3. Pemanfaatan sistem informasi adalah penggunaan sistem informasi oleh manajemen OPD di Provinsi Bengkulu dengan tujuan agar laporan keuangan dapat memiliki kualitas yang baik dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Dimensi yang diukur adalah kemudahan mengoperasikan sistem informasi, kemudahan memahami sistem informasi dan kualitas sistem informasi. Ketiga dimensi tersebut dijabarkan menjadi 9 indikator. Parameter ini diukur dengan skala *likert* 1-5, dengan kriteria nilai 1 (sangat tidak setuju); nilai 2 (tidak setuju); nilai 3 (cukup setuju); nilai 4 (setuju); dan nilai 5 (sangat setuju).
 4. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan OPD di Provinsi Bengkulu kepada pengelola keuangan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Dimensi dan indikator yang diukur adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dimensi tersebut dijabarkan ke dalam 16 indikator. Parameter ini diukur dengan skala *likert* 1-5, dengan kriteria nilai 1 (sangat tidak setuju); nilai 2 (tidak setuju); nilai 3 (cukup setuju); nilai 4 (setuju); dan nilai 5 (sangat setuju).

Tabel 3. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber
Kualitas laporan keuangan	Relevan	- Tepat waktu - Lengkap - Manfaat prediktif - Umpan balik	PP 71 Tahun 2010 dan Beest, Braam dan Boelens (2019)

Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber
	Andal	- Penyajian jujur - Dapat diverifikasi - Netralitas	PP 71 Tahun 2010
	Dapat dibandingkan	- Dapat dibandingkan dengan priode sebelumnya - Dapat dibandingkan dengan entitas lainnya	PP 71 Tahun 2010
	Dapat dipahami	- Laporan terstandarisasi - Kesamaan istilah	PP 71 Tahun 2010
Pemahaman akuntansi	Pemahaman Transaksi	- Pemahaman Proses transaksi - Pemahaman siklus akuntansi	Bastian (2010)
	Analisis Bukti Transaksi	- Pengumpulan alat bukti - Pengelompokkan alat bukti - Pencocokan informasi alat bukti	Bastian (2010)
	Pencatatan Transaksi	- Pencatatan jenis transaksi - Pencatatan alokasi anggaran - Penyusunan jurnal	Bastian (2010)
	Pengelompokkan dan Pengikhtisaran	- Pemisahan berdasarkan akun - Perekaman data berdasarkan akun	Bastian (2010)
	Pelaporan	- Pembuatan Neraca - Pembuatan LRA - Pembuatan Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan	Bastian (2010)
Sistem Pengendalian Intern	Lingkungan pengendalian	- Standar perilaku dan etika - Gaya kepemimpinan - Struktur organisasi	Bodnar dan Hopwood (2016) dan PP 60/2008
	Penilaian resiko	- Teknik pengendalian resiko - Pelaksanaan evaluasi	Bodnar dan Hopwood (2016) dan PP 60/2008
	Aktivitas pengendalian	- Kebijakan dan prosedur - Pemisahan fungsi - Pemisahan tanggung jawab	Bodnar dan Hopwood (2016) dan PP 60/2008
	Informasi dan komunikasi	- Kejelasan kebijakan - Keikutsertaan tiap unit	Bodnar dan Hopwood (2016) dan PP 60/2008

Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber
	Pemantauan	- Dokumen kegiatan - Pemantauan rutin - Efektivitas pemantauan	Bodnar dan Hopwood (2016) dan PP 60/2008

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah bagian pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara dan Operator SIMDA pada 36 OPD di Provinsi Bengkulu. Jumlah populasi di masing-masing OPD adalah sebanyak 4 orang. Jadi jumlah seluruh populasi sebanyak $36 \times 4 \text{ orang} = 144 \text{ orang}$.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *sensus*. Menurut Sugiyono (2010: 6), metode *sensus* adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil sampel sebanyak populasi. Jadi pada penelitian ini jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 144 orang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner, kuisisioner diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggarmaka uji ststistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil (Ghozali, 2011). Pengujian normalitas menggunakan metode *getjer* dengan nilai Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujiannya adalah:

- Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$; maka data tidak berdistribusi normal.
- Jika nilai $p\text{-value} > \alpha 0,05$; maka data berdistribusi normal.

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor dengan pendekatan *Principal Component Analysis* (PCA). Menilai valid atau tidaknya suatu indikator, dapat dilihat dari nilai *loading factor*. Indikator yang layak di analisis (valid) jika memiliki *loading factor* $> 0,5$ (Ghozali, 2011:34).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat seberapa besarnya suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten terhadap situasi apapun (Erlina, 2008:78). Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu instrument dapat dikatakan *reliable* jika nilai *alpha cronbach* $> 0,7$, dan sebaliknya dikatakan tidak *reliable* jika *alpha cronbach* $< 0,7$ (Ghozali, 2011:35).

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y	: Kualitas laporan keuangan
α	: Konstanta
b_1, b_2, b_3	: Koefisien regresi
X_1	: Pemahaman akuntansi
X_2	: Sistem pengendalian intern
ε	: <i>Error term</i>

Dari persamaan regresi yang diperoleh, diketahui nilai koefisien regresi (beta) yang merupakan faktor pengali tetap dari masing-masing variabel bebas. Koefisien regresi bertanda (+) berarti bahwa variabel bebas berpengaruh positif, sedangkan jika bertanda (-) berarti bahwa variabel bebas berpengaruh negative.

3.5.4 Uji Hipotesis

Dari analisis regresi diketahui nilai t-hitung dan nilai F-hitung. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji t

Nilai t-hitung yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan OPD di lingkungan Provinsi Bengkulu. Kriteria pengujian dengan uji t adalah:

- Jika nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} < \alpha 0,05$; maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} > \alpha 0,05$; maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji F

Nilai F-hitung digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} < \alpha 0,05$ maka model regresi layak (*fit*).
- Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} > \alpha 0,05$ maka model regresi tidak layak (tidak *fit*).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil analisis regresi didapatkan nilai koefisiensi determinasi (R^2). Nilai R^2 adalah nilai untuk mengukur seberapa besar persentase kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi peningkatan atau penurunan variabel dependen (Ghozali, 2011:65). Nilai koefisiensi determinasi (R^2) adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan antar variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.